

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi yang dipilih oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan sebenarnya (Hartoto, 2009).

Maxfield dalam Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian ini mengevaluasi laporan keuangan tahunan Partai Politik Berazaskan Islam Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Entitas Nirlaba diawali dengan analisis komparatif terhadap PSAK 45 (Revisi 2011).

3.2 Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*.

Metode ini memilih sampel secara nyaman (*convenience*) bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2012). Terdapat lima partai politik berazaskan Islam yang berkantor wilayah di Lampung yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Keadilan Sejahtera
3. Partai Amanat Nasional
4. Partai Persatuan Pembangunan
5. Partai Bulan Bintang

Adapun dari lima partai politik tersebut, Partai Amanat Nasional tidak bersedia memberikan laporan keuangannya sampai batas waktu yang ditentukan penulis sedangkan pada Partai Bulan Bintang, penulis tidak berhasil melakukan komunikasi. Sehingga penelitian ini dilakukan pada tiga sampel yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Gambaran umum mengenai sampel penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada 23 Juli 1998 oleh KH. Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, KH. Moenasir Ali, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, dan KH.A. Muchid Muzadi. PKB memiliki visi dan misi yaitu:

Visi : Terwujudnya masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidgu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (al-musawa).

Misi : Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar maruf nahi munkar yakni

menyerukan kebijakan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, PKB memperoleh 9,04% suara sah secara nasional dan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung, PKB memperoleh 7 kursi.

3.2.2 Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdiri pada 20 Juli 1998 dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Visi : Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat

Misi :

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk

membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources & knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh

penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, PKS memperoleh 6,79% suara sah secara nasional dan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung, PKS memperoleh 8 kursi.

3.2.3 Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri pada 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam

Perti. PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, yaitu:

1. KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
2. H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
3. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
4. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
5. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Visi : Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman

Misi

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan

memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, PPP memperoleh 6,53% suara sah secara nasional dan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung, PPP memperoleh 4 kursi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dari masing-masing jenis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Indriantoro (2012) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Data Primer diperoleh langsung dari Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Lampung berupa kuisisioner.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro (2012) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder berasal dari data yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Lampung berupa Laporan Keuangan, Visi dan Misi, serta Susunan Kepengurusan Tahun 2014.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Sugiyono (2010) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan kuisisioner.

1. Dokumentasi

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa Laporan Keuangan, Visi dan Misi, serta Susunan Kepengurusan Tahun 2014. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode kuisisioner.

2. Kuisisioner

Suwardi (2003) menerangkan bahwa teknik yang menggunakan angket (kuisisioner) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuisisioner digunakan untuk mengetahui sejauh mana sampel penelitian melaksanakan praktik standar laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 45 (Revisi 2011).

Kuisisioner ini diadaptasi dari butir-butir PSAK 45 (Revisi 2011) yang diterbitkan oleh IAI, dan yang dipakai oleh Asti Aini dalam skripsinya yaitu Evaluasi Penerapan PSAK Nomor 45 pada Organisasi Pengelola Zakat

ditambah dengan kuisioner yang dipakai Sutanto dalam skripsinya yaitu Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhid dan Lazda Lampung Peduli dan Kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

Metode pengukuran sikap yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan skala Likert dengan tiga alternatif jawaban, yaitu:

- a. Rutin
- b. Tidak Rutin
- c. Tidak Pernah

Dengan rincian sebagai berikut

Bentuk Jawaban	Skor
A	3
B	2
C	1

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengentitasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Analisis Kuantitatif

Hasil dari penelitian kuantitatif berupa angka-angka atau data statistik sehingga dibutuhkan suatu alat pengukuran untuk menghasilkan kesimpulan yang akan ditarik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian menerapkan perihal yang akan diteliti, maka ada indikator-indikator yang dijadikan sebagai standar acuan. Dalam penelitian ini, indikator yang akan dipakai adalah komponen-komponen terpenting dari PSAK Nomor 45, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Indikator Laporan Posisi Keuangan meliputi:

- a. Menyajikan informasi aktiva pada laporan posisi keuangan berdasarkan urutan likuiditasnya.
- b. Menyajikan informasi kewajiban berdasarkan urutan tanggal jatuh temponya.
- c. Mengklasifikasi informasi aktiva ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar.
- d. Mengklasifikasi informasi kewajiban ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- e. Menyajikan jumlah aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, tidak terikat.

- f. Mengungkapkan informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer dengan cara menyajikan jumlah tersebut.

2. Laporan Aktivitas

Indikator Laporan Aktivitas meliputi:

- a. Menyajikan informasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.
- b. Menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat (kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang).
- c. Menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.
- d. Menyajikan sumbangan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer (tergantung pada ada tidaknya pembatasan).
- e. Menyajikan keuntungan dan kerugian diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat (kecuali jika penggunaannya dibatasi).
- f. Menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto (atau dapat secara neto untuk pendapatan investasi dengan syarat beban-beban terikat).
- g. Menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3. Laporan Arus Kas

Indikator Laporan Arus Kas meliputi:

- a. Mengklasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- b. Melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.
 - c. Membukukan arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas.
 - d. Mengungkapkan komponen kas setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlahnya dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dengan yang disajikan di neraca.
 - e. Mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan dengan bebas.
 - f. Mengungkapkan penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - g. Mengungkapkan penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi.
 - h. Mengungkapkan bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
 - i. Mengungkapkan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Indikator Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi:
- a. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva.

- b. Menjelaskan jumlah dan sifat aktiva, kewajiban.
- c. Menjelaskan pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- d. Menjelaskan jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
- e. Menjelaskan cara mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas.
- f. Menjelaskan usaha jasa organisasi.

Di dalam penelitian ini skor rata-rata untuk kuisioner dalam implementasi PSAK 45 (Revisi 2011) adalah:

1. Skor 37-73 = Laporan keuangan Partai Politik belum menerapkan PSAK 45 (Revisi 2011)
2. Skor 74-93 = Laporan keuangan Partai Politik sudah menerapkan PSAK 45 (Revisi 2011) namun belum sepenuhnya sesuai.
3. Skor 94-111 = Laporan keuangan Partai Politik sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011)

3.5.2 Analisis Kualitatif

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan gambaran umum mengenai sampel.

2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengentitaskan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Setelah data dikumpulkan, penulis memilih data-data apa saja yang diperlukan dalam penelitian yaitu komponen laporan keuangan dan gambar umum mengenai sampel, adapun data yang tidak diperlukan, tidak menjadi fokus penelitian penulis.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk tabel berupa rekapitulasi hasil kuisisioner.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Setelah data dikumpulkan, direduksi, dan disajikan, penulis mengambil keputusan yaitu berupa penarikan simpulan dari hasil kuisisioner dengan kriteria yang telah ditentukan.